

**PENGARUH PEMGAWASAN INTERN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)**

**ARTIKEL**



**Oleh:**

**YUSMALIZAR**

**57714/2010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2014**

---

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

**PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Prvinsi Sumatera Barat)**

Oleh :

Yusmalizar

57714/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode  
September 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Agustus 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP.19730213 199903 1 003



Erly Mulvani, SE, M.Si, Ak  
NIP.19781204 200801 2 001

**PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

Yusmalizar

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Email: [yus.malizar@yahoo.com](mailto:yus.malizar@yahoo.com)

**ABSTRACT**

This study aimed to examine the effect of internal control and financial management on the performance of local government areas (Empirical Study In West Sumatra Provincial Government on education). This research study is classified srbagai be causative.

The population in this study is the Regional Working Units (on education) Government of West Sumatra Province. The sample in this study is the staff / employees of the finance department then obtained sebayak respondents 93 respondents and the questionnaire is not ikembalikan 13 respondents. Data was collected by distributing questionnaires to the respondents directly concerned. Technical analysis is multiple regression with SPSS 16.

Based on the results of multiple regression with a significant level of 5%, the results of this study indicate menyimpulkan: (1) the effect of internal control significant positive effect on the performance of local government in West Sumatra Provincial Government with the  $\beta$  coefficient of the variable  $X_1$  is positive and significant value of 0.830 which is positive for 0 , 05  $<\alpha$  value of 0.05 and 9,000 t count> t table 1.991. So the hypotheses that have been formulated in accordance with the results of the study so that  $H_1$  can be accepted. (2) the financial management of the significant negative effect on the performance of local government in West Sumatra Provincial Government with the value of the  $\beta$  coefficient is negative  $X_2$  is - 0.003 and significant negative positive value of 0.005  $<\alpha$  0.05 and -0.026 tcount> 1.991 ttable . So the hypothesis that has been formulated in accordance with the results of the study so that  $H_2$  is rejected.

Suggestions on this research are: (1) the government agencies should carry out a review of the internal oversight and financial management of the performance of local government areas that local government performance can be achieved with either. (2) for further research can be done research to find a change of variables other variables that have strong influence on the performance of local government, can be accompanied by a qualitative research study sample and turnover, as well as changes made in the selection of alternative answers in the questionnaire study.

**Keywords: effect of internal control and financial management on the performance of local governmen**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Penelitian ini di golongkan srbagai penelitian yang bersifat kausatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah staf/karyawan bagian keuangan maka didapat responden sebanyak 93 orang responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknis analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *SPSS 16*.

Berdasarkan hasil regresi berganda dengan tingkat signifikan 5% maka hasil penelitian ini menunjukkan menyimpulkan: (1) pengaruh pengawasan intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_1$  bernilai positif yaitu 0,830 dan nilai signifikan positif sebesar  $0,05 < \alpha < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 9,000 > t_{tabel} 1,991$ . Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga  $H_1$  dapat diterima. (2) pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan negative terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_2$  bernilai negatif yaitu -0,003 dan nilai signifikan negative positif sebesar  $0,005 < \alpha < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} -0,026 > t_{tabel} 1,991$ . Jadi hipotesisi yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga  $H_2$  ditolak.

Saran pada penelitian ini adalah: (1) bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pengawan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah agar kinerja pemerintah daerah dapat tercapai dengan baik. (2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kinerja pemerintah daerah, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

**Kata Kunci:** pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

## Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pemerintah pusat maupun daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut pemerintah daerah di beri wewenang untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri (Wawan, 2009)

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, guna evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengawasan disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian mengukur kinerja tidak hanya informasi finansial tetapi juga informasi nonfinansial. (Indra, 2010)

Kinerja pemerintah daerah adalah sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi daerah yang tertuang dalam

dokumen perencanaan daerah..Kinerja pemerintah daerah dapat diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negatif kebijakan operasional yang telah diambil (Chabib, 2011)

Pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan comparability informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting. kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar-standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya, guna menghasilkan tindakan dan *outcome* yang diinginkan (Abdul, 2009). Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*). Dalam hal ini terdapat empat elemen kunci dari sistem pengukuran kinerja: (a) perencanaan dan pencapaian tujuan; (b) pengembangan ukuran yang relevan; (c) pelaporan format dan hasil; (d) pengembangan informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2005)

Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal (Effendi, 2005). Maksud pengawasan tersebut antara lain

meliputi: (1) meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab, (2) memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN, (3) menegakkan peraturan yang berlaku, dan (4) mengamankan keuangan Negara. Pengawasan keuangan dilakukan oleh auditor internal dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dapat dilakukan oleh auditor eksternal (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2008).

Pengawasan intern merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan telah dipatuhi, pengawasan sangat erat hubungannya dengan perencanaan, dimana tanpa adanya perencanaan sebagai pedoman, maka pengawasan akan sangat sulit dilaksanakan, begitu juga sebaliknya, perencanaan tanpa pengawasan akan cenderung menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tujuan, sehingga hal ini selalu mendapat perhatian khusus dalam setiap kegiatan agar tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan dapat terwujud atau setidaknya mendekati sasaran yang diinginkan (Reeve, 2005).

Fungsi pengawasan intern merupakan suatu fungsi pengawasan yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Pengawasan intern di lingkungan sektor publik, mempunyai sifat yang khusus (Wawan, 2009). Organisasi pemerintahan dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor *private*. Ketaatan dalam pelaksana anggaran menjadi ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik. Demikian pula dengan pembagian kekuasaan, Otonomi daerah sudah digulirkan dalam pengelolaan instansi pemerintah (Askam, 2008). Dengan demikian evaluasi kinerja pemerintah pusat

dan daerah dapat dilakukan terpisah. Pengelolaan asset publik juga tidak semata-mata dilakukan dengan prinsip ekonomi yang dianut sektor *private*, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor *private* (Askam, 2008).

Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (Askam, 2008). Terdapat empat dimensi yang penting yang tercermin dari pengertian tersebut, yaitu (1) adanya dimensi hak dan kewajiban; (2) adanya dimensi tujuan dan perencanaan; (3) adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik; dan (4) adanya dimensi nilai uang dan barang (Askam, 2008).

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain, dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan perencanaan dimaksud, pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut ditemukan beberapa fenomena yang nampak dan dapat diteliti seperti halnya fenomena yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2007 ditemukan, kekurangan fisik pekerjaan pada Dinas

Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman- Disprasjaltarkim sebesar 1 Milyar 295 juta rupiah. Hal tersebut terulang di tahun 2009 yakni kekurangan fisik pengerjaan dan pengaspalan jalan Sicincin-Malalak B yang merugikan keuangan daerah 317 juta rupiah, dan terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan lapis pondasi agregat kelas a dan b, sebesar 450 juta. pada tahun 2011 BPK menemukan dana hibah bansos terjadi pada LKPD Sumatera Barat tahun 2011. Dana sebesar 21,32 Miliar Rupiah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak beresiko sosial. 222 juta rupiah diberikan kepada penerima yang tidak jelas nama dan alamat terang, 121 juta diberikan kepada PNS. Selanjutnya, biaya perjalanan dinas yang di mark up atau fiktif senilai 184 JutaRupiah, ditemukan pada LKPD Tahun 2012. Sementara di tahun 2012, tiga pekerjaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air-PSDA tidak sesuai kontrak minimal sebesar 355,36 juta rupiah. Selain itu, terjadi kelebihan pembayaran pelaksanaan pembangunan jembatan dan pengelolaan sistem pengelolaan air minum dan limbah pada Disprasjaltarkim sebesar 467 juta rupiah.(sumber: kabarpadang.com, 16 mei 2013).

Adapun penelitian ini mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Wawan (2009) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya penelitian menurut

Askam (2008) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dimana penelitian Sekarang mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan Penelitian menurut Wawan (2009) tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Perbedaannya terletak pada (1) Indikator dalam tiap variabel independen Pengawasan Intern, menggunakan indikator COSO. (2) Variabel Independen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sedangkan penelitian menurut Askam (2008) tentang Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Perbedaannya terletak pada Terdapat perbedaan variabel yakni, pemeriksaan intern, pemahaman sistem akuntansi keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti atau melakukan pengkajian dengan judul sebagai berikut **“Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”**.

#### **A. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat?
3. Sejauhmana kinerja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap kinerja pemerintah daerah?
5. Sejauhmana pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
6. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat?

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Baarat?
2. Sejauhmana pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengawasan intern pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang:

1. Untuk mengetahui pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Provinsi Sumatera Barat.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis  
Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh diperguruan tinggi terkait dengan pelaksanaan pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah.Salah satunya dalam mata kuliah konsentrasi akuntansi sektor publik.
2. Bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat  
Memberikan tambahan informasi dan masukan bagi pentingnya pengawasan intern.Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah.Sebagai sarana memperkenalkan pada masyarakat khususnya dilingkungan instansi pemerintah.
3. Bagi Akademisi  
Sebagai khasanah penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan akademi

## **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **1. Kinerja Pemerintah Daerah**

##### **a. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Abdul (2007) Kinerja Pemerintah Daerah adalah:

“merupakan gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang



dalam rumusan skema strategis (*strategi planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu”.

Menurut beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas dan efektivitas kinerja, karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas kinerja yang tinggi dalam suatu instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting.

#### **b. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2007), dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

“Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan.

#### **c. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja**

Menurut Mardiasmo (2009), secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
2. Untuk mengukur kinerja keuangan dan non keuangan secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengkomunikasikan pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan kemampuan kolektif yang rasional.

#### **D. Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Chabib (2011) dilihat dari objek tingkatan kinerja pemerintah daerah, dapat dibagi menjadi:

1. Kinerja kebijakan
2. Kinerja program
3. Kinerja kegiatan

#### **e. Manfaat Pengukuran Kinerja**

Menurut Mardiasmo (2009), dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan menjelaskan manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

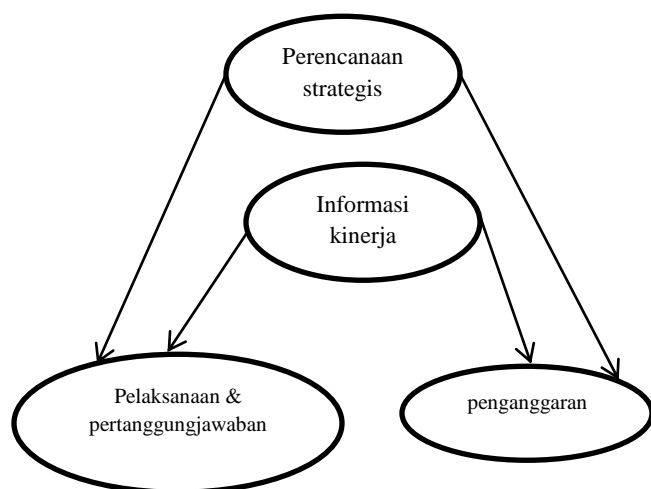
1. Memberikan pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

#### **f. Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah**

Informasi tentang kinerja menjadi informasi penting yang dibutuhkan disetiap fase sektor publik dalam mencapai visi dan misinya. Dalam aspek perencanaan,

informasi tentang kinerja memberi gambaran penting dan fundamental tentang kondisi saat ini yang menjadi basis perencanaan (Dedi, 2007).

Penjelasan di atas ditunjukkan keberadaan informasi kinerja yang dibutuhkan pada berbagai fase pengolahan organisasi sektor publik seperti yang ditunjukkan pada bagan berikut :



**Skema Laporan Kinerja**  
**Sumber: Dedi (2007), Akuntansi**  
**Sektor Publik**

#### g. Indikator kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mohamad (2006) Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu:

1. Indikator Masukan (*Input*)
2. Indikator Proses (*Process*)
3. Indikator Keluaran (*Output*)
4. Indikator Hasil (*Outcomes*)
5. Indikator Manfaat (*Benefit*)
6. Indikator Dampak (*Impact*)

#### 2. Pengawasan Intern

##### a. Pengertian Pengawasan Intern

Sawyer (2005) dalam Tuasikal (2008), menegaskan pengendalian internal merupakan:

“suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris,

manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisien operasi, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengawasan intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dijalankan oleh orang, pengawasan intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan dengan pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

##### b. Indikator Pengawasan Intern

menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) yang dikutip oleh Santoyo (2009) adalah :

1. Lingkungan pengawasan
2. Penaksiran resiko
3. Aktivitas pengawasan
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

##### c. Manfaat Pengawasan Intern

Pengawasan intern dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan.

#### 3. Pengelolaan Keuangan Daerah

##### a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang berisi hak dan kewajiban yang dinilai dari uang maupun barang yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **b. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2007) indikator pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah
2. Pelaksanaan dan penatausahaan
3. Pertanggungjawaban keuangan daerah
4. Pengawasan keuangan daerah

#### **c. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sistem paradigma baru pengelolaan keuangan daerah oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat daerah terhadap pengelolaan APBD secara transparan dan akuntabel
2. Pemberlakuan Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang baru serta peraturan pelaksanaannya.
3. Sistem, prosedur dan format struktur APBD yang berlaku selama ini dinilai kurang mampu mendukung tuntutan

perubahan sehingga perlu perencanaan APBD yang sistematis, terstruktur dan komprehensif. Perencanaan APBD dengan paradigma baru tersebut adalah :

- a. APBD yang berorientasi pada kepentingan publik.
- b. APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
- c. Terdapat keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran oleh unit kerja.
- d. Terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah dan Unit-unit Pengelola Layanan Publik dalam pengambilan kebijakan.

#### **d. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **e. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa

tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah :

1. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.
4. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
5. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.”

Sedangkan menurut Abdul (2004:84) mengemukakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Tanggung jawab
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna dan kegiatan bunga
5. Pengendalian

#### **1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Wawan (2009) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian Askam (2008) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Penelitian Abdul (2009) meneliti tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap fungsi Pengawasan intern.

#### **B. Hubungan Antar Variabel**

##### **1. Hubungan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Indra (2010) Kinerja merupakan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan skema strategis suatu organisasi. Jadi kinerja pemerintah daerah adalah berhasil atau tidaknya sasaran dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, serta dampak positif dan negative kebijakan operasional yang telah diambil oleh instansi pemerintah daerah (Chabib, 2011)

Setelah dilakukan pengawasan Intern oleh pengawasan berwenang maka untuk mendukung keberhasilan, agar pengawasan intern dapat berfungsi secara efektif. Fungsi pengawasan intern merupakan suatu fungsi

pengawasan yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Jadi Pengawasan Intern merupakan suatu tindakan yang menjadi alat dalam pencapaian kinerja, apabila pengawasan intern telah tercapai sesuai yang diharapkan maka mendukung tercapainya kinerja pemerintah daerah yang diharapkan.

## 2. Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib (2011) menyatakan bahwa: "Kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil. Melalui informasi tersebut, selanjutnya dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas suatu kebijakan, menetapkan kegiatan/program utama, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik sebagai bahan untuk perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan, serta untuk memutuskan suatu tindakan yang dinilai paling rasional dan menguntungkan."

### C. Kerangka Konseptual

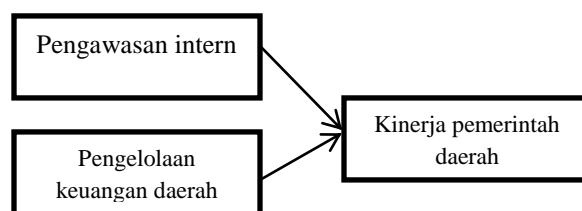
Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu Kinerja Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, Pengawasan

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Pengawasan intern dimaksudkan untuk membantu manajemen melaksanakan tanggung jawab dalam pencapaian kinerja secara efektif. Fungsi pengawasan intern melakukan analisis penilaian, mengajukan saran-saran, dan mengembangkan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar dalam Abdul (2009)

Adapun rencana pengelolaan keuangan daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) di setiap unit pelaksana anggaran daerah sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, tanggungjawab dan fungsi yang menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2**

### Kerangka Konseptual

### D. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Berdasarkan kerangka

pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

$H_1$  : Pengawasan Intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

$H_2$  : Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variable dengan variable yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variable bebas mempengaruhi variable terikat.

### B. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2010) adalah kumpulan dari seluruh elemen yang sejenis yang dapat dibedakan satu sama lainnya, disebabkan adanya nilai karakteristik yang berlainan. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 31 SKPD, yang terdiri dari 18 dinas, 12 Badan serta 1 Inspektorat.

#### 2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh total sampel yakni 31 dinas SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### 3. Responden

Responden pada penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan staf

keuangan di masing-masing SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis data

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari responden penelitian (Kepala Bagian Keuangan) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat melalui angket penelitian mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

#### 2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2010). Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.. Sumber data dari penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan yang dan staff akuntansi yang terdapat pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dengan cara kuesioner yang diberikan kepada staf akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat.

### E. Variable Penelitian

Untuk penelitian ini memiliki beberapa variable yakni:

1. Variable bebas yaitu Pengawasan *Intern* ( $X_1$ ) dan Pengelolaan Keuangan Daerah ( $X_2$ ).
2. Variable terikat yaitu Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat ( $Y$ ).

### F. Pengukuran Variabel

Pengukuran variable dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert dengan 5 (Lima) alternative jawaban yang masing-masing diberi skor yakni: Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup Baik (CB), Tidak Baik (TB), Sangat tidak Baik (STB).

## G. Instrument Penelitian

### 1. Bentuk Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Angket yang digunakan untuk memperoleh data mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Pengisian angket ini dilakukan oleh staf akuntansi di dinas SKPD Provinsi Sumatera Barat.

### 2. Penyusunan Instrumen

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan angket penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Menyusun Angket

Angket disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan masalah dan kajian teoritis sebelumnya, maka dapat ditentukan indikator variable seperti yang dijelaskan oleh Arikunto (2000) bahwa penelitian indikator adalah sesuatu yang dapat menunjukkan atau menjadi petunjuk bagi sub variabel-variabel. Selanjutnya indikator tersebut dijabarkan menjadi butir-butir item.

#### H. Uji Validitas dan Reliabilitas

##### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan rumus *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \text{(Arikunto, 2006:170)}$$

Dimana:

$r_{xy}$  = koefisien korelasi

N = Besar sampel

x = Variabel bebas ( $X_1, X_2$ )

y = variabel terikat

Jika nilai  $r$  hitung  $< r$  table maka nomor item tersebut tidak valid dan jika nilai  $r$  hitung  $> r$  table maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat digunakan rumus

*croanbach's alpha* sebagai berikut:

$$r = \text{(Arikunto, 2006:196)}$$

Dimana:

r = Reliabilitas Instrumen

k = Banyak butir pertanyaan

= jumlah varians butir

= varians total

Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria sebagai berikut:

- Kurang dari 0,6 tidak reliable
- 0,6 - 0,7 akseptabel
- 0,7 - 0,8 baik
- Lebih dari 0,8 reliabel

#### I. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji *statistic Kolmogorov smirnov*, data yang normal adalah data yang memiliki nilai signifikan  $> 0,05$

##### 2. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi mengasumsikan tidak terjadinya *heteroskedastisitas*. Untuk mendeteksi terjadinya gejala *heteroskedastisitas* maka dilakukan uji *glejser*. Data yang tidak *heteroskedastisitas* adalah data yang nilai signifikan diatas tingkat kepercayaan 0,05 ( $>5\%$ )

##### 3. Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinearitas* bertujuan untuk mendeteksi apakah tidak terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independent yang satu dengan variabel independent

yang lain. Korelasi antara variabel independent ini dapat dideteksi dengan menggunakan *variabel inflation factor* (VIF). *Multikolinearitas* terjadi jika nilai toleransinya  $>0,10$  dan nilai VIF  $<10$ .

## J. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan langkah-langkah berikut:

### 1. Analisis Deskriptif

#### a. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan semua pertanyaan yang telah diisi oleh responden.

#### b. Menghitung Nilai Jawaban

$$\frac{5SB + 4B + 3RR + 2SB + 1STB}{15}$$

Dimana :

SB = Sangat Baik

B = Baik

RR =Ragu-Ragu

TB = Tidak Baik

STB = Sangat Tidak Baik

#### c. Menghitung Relevan Responden

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{h=1}^n X_i}{n}$$

Dimana:

$X_1$  = Skor Total

n = Jumlah Responden

#### d. Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif dengan rumus:

$$\text{TCR} = x \cdot 100\%$$

Dimana:

TCR = Tingkat Capaian Responden

$R_s$  = Rata-rata skor jawaban responden

n = Nilai skor jawaban

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

#### a. Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik

b. Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik

c. Interbal jawaban responden  $<56\%$  kategori jawabannya kurang baik

## K. Metode Analisis Data

### 1. Analisis Regresi Berganda

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

a = Konstanta

$b_1, b_2$  = Koefisien regresi dari variabel independen

$X_1$  = Pengawasan Intern

$X_2$  = Pengelolaan Keuangan Daerah

e = error term

### 1. Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah *fix* atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2 (k-1)}{(1-R^2)(n-k)}$$

(Gujarati, 2003)

Dimana:

F = Uji F

$R^2$  = Koefisien determinan

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah Sampel

### 2. Uji Hipotesis (*t-Test*)

t-Test dengan rumus:

$$t - \text{Test} = \frac{\beta_n}{S\beta_n}$$



Dimana:

$t$  = Nilai mutlak untuk pengujian

$\beta_n$  = Koefisien regresi masing-masing variabel

$S_{\beta_n}$  = Standar error masing-masing variabel

Dengan kriteria pengujian:

a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak.

### 3. Uji Determinasi

$$Adjusted R^2 = (1 - R^2) \left[ \frac{N - 1}{N - k} \right]$$

Dari rumus diatas dijelaskan bahwa:

- Kalau  $k > 1$  maka  $adjusted R^2 < R^2$ , yang berarti bahwa apabila banyaknya variabel bebas ditambah, maka  $adjusted R^2$  dan  $R^2$  akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan  $adjusted R^2$  lebih kecil dari pada  $R^2$
- $Adjusted R^2$  dapat positif atau negatif, walaupun  $R^2$  selalu non negative. Jika  $adjusted R^2$  negatif nilainya dianggap 0

## F. Definisi Operasional

### 1. Pengawasan Intern

Merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan yang berfungsi untuk mengantisipasi, memonitor, dan menghindari kesalahan tugas-tugas organisasi sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan Intern dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya yang dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi buruk dan segala konsekuensinya.

### 2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Merupakan segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka anggaran dan belanja daerah. Tujuan tercapainya pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerah.

### 3. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja sebagai perilaku nyata yang ditampilkan orang kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas dan efektivitas kinerja, karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas kinerja yang tinggi dalam suatu instansi. Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Uji Validitas dan Reabilitas Penelitian

#### 1. Uji Validitas

Tabel 12

Nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil

Instrument Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,321
Pengawasan Intern ( $X_1$ )	0,722
Pengelolaan Keuangan Daerah ( $X_2$ )	0,552

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *corrected item-total correlation* untuk masing-masing instrument kinerja pemerintah daerah diketahui nilai *corrected item-total correlation* terkecil 0,321. Instrument pengelolaan keuangan daerah terkecil 0,522, dan untuk pengawasan intern adalah 0,722.

## 2. Uji Realibilitas

**Tabel 13**  
Nilai Cronbach's Alpha

Instrument Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0,916
Pengawasan Intern (X <sub>1</sub> )	0,955
Pengelolaan Keuangan Daerah (X <sub>2</sub> )	0,922

Keandalan konsistensi antara item atau koefisien keandalan Cronbach's Alpha yang terdapat pada tabel diatas yaitu instrument Pengawasan intern 0,955, untuk instrument Pengelolaan Keuangan Daerah 0,922, dan untuk instrument Kinerja Pemerintah Daerah 0,916. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran 0,90. Dengan demikian semua instrument penelitian dapat dikatakan reliabel.

## D. Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

**Tabel 14**  
Uji Normalitas

		Unstandardize d Residual
N		80
Normal Parameters (a,b)	Mean	.0000000
	Std.Deviation	3.78498173
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.060
Kolmogorov – Smirnov Z		.981
Asymp.Sign. (2-tailed)		.291

Dari tabel di atas terlihat bahwa uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov – Smirnov* sebesar 0,981

dengan signifikan 0,291. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan bias dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas > 0,05.

## 2. Uji Multikolinearitas

**Tabel 15**  
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengawasan intern	.466	2.148
	Pengelolaan keuangan daerah	.466	2.148

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam tabel di atas menunjukkan Variabel pengawasan intern (X<sub>1</sub>) dan pengelolaan keuangan daerah (X<sub>2</sub>) dengan nilai VIF 2,148 adalah nilai VIF yang kecil dari 10, dan nilai *tolerance* adalah 0,466 > 0,1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat toleransi antar sesama variabel bebas dalam model regresi dan dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

## 3. Uji Heterokedastisitas

**Tabel 16**  
Uji Heterokedastisitas  
(*Glejser Test*)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error			
1	(Constant)	11.265	1.993		5.653	.000
	Pengawasan intern	-.062	.051	-.184	-1.218	.227
	Pengelolaan keuangan daerah	-.125	.067	-.278	-1.848	.069

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig variabel-variabel > 0,05 (sig > 0,05), maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas

### E. Hasil Analisis Regresi Berganda

**Tabel 17**  
**Koefisien Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
	B	Std. Error			
1 (Constant)	22.094	3.600		6.138	.000
Pengawasan intern	.830	.092	.834	9.000	.000
Pengelolaan keuangan daerah	-.003	.122	-.002	-.026	.980

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 22,094 + 0,830(X_1) - 0,003(X_2) + \epsilon$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstan sebesar 22,094 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu pengawasan intern, pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah adalah nol maka kinerja pemerintah daerah adalah sebesar konstanta 22,094.
2. Koefisien pengawasan intern sebesar 0,830 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu kesatuan pengawasan intern maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,830 dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien pengelolaan keuangan daerah sebesar -0,003 mengindikasikan setiap peningkatan satu kesatuan pengelolaan keuangan daerah maka akan menurunkan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,003 dengan asumsi variabel lain konstan

### F. Uji Model

#### 1. Uji F (F-Test)

**Tabel 18**  
**Uji F Statistik**

model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	sig
1	Regression	2546.239	2	1273.120	86.617	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1131.761	77	14.698		
	Total	3678.000	79			

Dari hasil analisis data yang diperoleh mengenai pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Hasil pengolahan statistic analisis regresi menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 karena nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah *fix*, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian. Dari hasil pengujian juga dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### 2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 19**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.832 <sup>a</sup>	.692	.684	3.83382

Dari tampilan *output SPSS model summary* pada tabel 18 di atas besarnya Adjusted R Square adalah 0,692. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel pengawasan intern, pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah sebesar 69,2%, sedangkan 37,1% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

### G. Uji Hipotesis (t-test)

Uji t statistic (*t-test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel

terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05$  dan derajat bebas  $(db) = n - k - 1 = 80 - 1 = 79$  adalah 1,991

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 17, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen uraiannya sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengawasan Intern ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Pengelolaan keuangan daerah ( $X_2$ ) berpengaruh positif negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

## H. Pembahasan

### 1. Hubungan Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin meningkat pelaksanaan pengawasan intern maka kinerja pemerintah daerah juga meningkat. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengawasan intern dan kinerja pemerintah mempunyai hubungan positif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wawan (2009) yang mengemukakan bahwa pengawasan intern merupakan alat yang paling efektif yang dibangun ke dalam infrastruktur organisasi dan menjadi bagian dari inti organisasi. Pengawasan intern yang terpadu akan meningkatkan mutu dan insentif organisasi, menghindari biaya-biaya tidak perlu dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah. Selanjutnya penelitian menurut Askam (2008) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek lingkup pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan intern merupakan salah satu aspek yang

mendukung untuk tercapainya kinerja aparat pemerintah daerah.

Berdasarkan data distribusi, dilihat sebaran frekuensi hasil jawaban sebanyak 80 responden yang diteliti, ditemukan responden sangat baik bahwa pengawasan intern dimulai dengan melihat tingkat kehadiran yang memadai, dengan TCR yang baik. Hal ini juga didukung oleh pengawasan intern menunjang setiap pengerjaan tugas dan selesai sesuai rencana, baik aspek fisik maupun rencana, dengan TCR yang baik. Pengawasan intern dapat mengurangi kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan tugas, dengan TCR yang baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengawasan intern dijadikan sebagai pengawasan awal terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat akan lebih terarah dalam pencapaian sasarannya. Selain itu penyimpangan dan penyelewengan juga akan terminimalisir karena satuan kerja menggunakan prosedur yang merupakan bagian dari pengawasan sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Halim (2004) pengawasan intern dapat membantu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi perundang-undangan dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya,

dan terhindar dari hal-hal yang merugikan.

## **2. Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Askam (2008) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul (2009) yang meneliti tentang pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, yang mana implementasi sistem pengelolaan keuangan telah mendorong peningkatan kinerja Pemerintah daerah, sebab proses pengelolaan keuangan menekankan pada hubungan antara dana yang dianggarkan dengan hasil-hasil yang ingin di capai.

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pengawasan intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dimana semakin baik pengawasan intern maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah, maka hasil pengawasan intern

terhadap kinerja pemerintah daerah ( $H_1$ ) diterima.

2. Pengelolaan keuangan daerah pada SKPD, Badan dan Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah/Negara, potensi kerugian daerah/Negara, kekurangan penerimaan dan administrasi pada SKPD, Badan dan Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. maka hasil penelitiannya adalah ( $H_2$ ) ditolak.

#### **B. Keterbatasan**

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan, tetapi penelitian ini masih memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Penyebaran kuesioner pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner.
2. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner yang mempengaruhi hasil penelitian, karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data yang diperoleh melalui sebagian wawancara langsung dengan responden.

#### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Bagi instansi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah daerah sehingga pemerintahan yang baik dapat terlaksana terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang harus cepat.

Tanggap dalam menjalankan setiap keluhan public atau masyarakat. Pegawai harus memiliki kreativitas mencari tata kerja yang baik.

2. Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada pemerintah pusat, agar semua karakteristik kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik dan optimal untuk mengantisipasi terjadinya praktek KKN pada lingkungan SKPD pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengawasan Intern pemerintah daerah sebaiknya menekankan pada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang dibentuk sistem tersebut sehingga pengawasan intern pemerintah daerah bias berjalan secara optimal
4. Pada penelitian berikutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, seperti implementasi *financial audit value for money* dan peran auditor internal.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Halim.2007. *Akuntansi Sektor Publik Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Rohman, 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Kinerja SKPD Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Askam Tuasikal, 2008. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis*
- Chabib Saleh dan Heru Rohmansyah.2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media
- Chabib Soleh dan Suropto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media
- Deddi Noerdiawan.2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ihyaul Ulum M.D. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Imam Ghozali, 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro
- Indra Bastian.2007.*Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Kadarisman,2012. *Manajemn Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta:Erlangga
- Laporan Hasil Pemeriksa BPK RI Tahun 2012
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset

- Muh.Arief Effendi, 2005. *Peranan Komite Audit Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan, Jurnal Iniah, Vol.1 No.1*
- Muhammad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Undang-Undang No.60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Prinsip, Norma, Azas dan Landasan Umum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000. *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Reeve James M., Philip E. Fess, and Carl S. Warren, 2005, *Pengantar Akuntansi*, Edisi Kedua Puluh Satu, Jakarta: Erlangga
- Sanyoto Gondodiyoto. (2009). *Pengelolaan fungsi Audit Sistem Informasi*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Sawyer Lawrence, 2005. *Internal Auditing- Auditing Internal Sawyer : Buku 1*. Jakarta :Salemba empat
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 4 rd Edition, John Wiley & Sons, Inc
- Soedarmayanti. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari (2009). *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Bisnis*